

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya membutuhkan banyak pendapatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pendapatan ini digunakan untuk menjalankan anggaran negara di tiap tahunnya dan menjalankan sistem ketatanegaraan. Salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang terbesar adalah pajak. Maka dari itu pajak merupakan komponen penting untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pengalokasian dana untuk pembangunan negara.

Pemungutan pajak yang memaksa dan tanpa balas jasa timbal balik individual oleh pemerintah dapat dijadikan suatu kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penyalahgunaan dalam pemungutan pajak tersebut. Besarnya nominal pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah mampu membutakan akal pikiran dan hati nurani mereka sehingga mampu melakukan hal-hal yang bukan hanya merugikan rakyat tetapi juga negara demi memperkaya diri mereka sendiri. Terlepas dari pemerintah kita melihat juga adanya masyarakat yang bermasa bodoh dan tidak membayar pajak terhadap penghasilan dan fasilitas yang sudah dinikmatinya.

Padahal, bila dihitung nominal pajak yang tidak dibayarkan pajaknya sangatlah besar dan bisa dibilang sangat membantu pemerintah didalam mengalokasikan dana tersebut untuk membuat sarana-sarana yang awalnya untuk

rakyat itu sendiri. Jika dilihat dan dibandingkan, besarnya pajak di Indonesia masih sangatlah kecil dibandingkan dengan negara lainya. Dapat dilihat jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak selama puluhan tahun hanya mencapai sekitar 3.6 juta. Dengan jumlah WP sebanyak itu, tax ratio pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga. Dari jumlah 3.6 jutapun hanya sebagian kecil yang aktif dan membayar pajak. Dari yang membayar pajakpun hanya sebagian kecil yang menghitung dan melaporkan pajaknya secara benar. Sebagian besar negara lain, menetapkan kepada warga negaranya untuk membayar pajak tersebut dengan nilai yang tinggi. Maka tidaklah heran fasilitas dan sarana negara-negara tersebut jauh lebih maju dibandingkan dengan negara kita, melihat kesadaran dan tingkat pendapatan negara tersebut terhadap pajak sangatlah tinggi. Banyak sekali kasus penggelapan pajak di Indonesia, seperti kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan, kasus penggelapan pajak oleh Grup Bakrie, kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan PT Indo Sepadan Jaya, dan akhir-akhir ini diduga adanya kasus penggelapan pajak oleh 10 orang pihak fiskus yang mencapai 300 miliar (<http://www.tempo.co/2013/06/12>).

Fenomena ini terjadi karena wajib pajak merasa dengan membayar pajak dapat mengurangi laba yang diperolehnya dari hasil kerja kerasnya, sehingga wajib pajak memiliki ide untuk merencanakan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan.

Perencanaan pajak bertujuan mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak dibagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak dan

penggelapan pajak. Kedua perencanaan pajak ini memiliki perbedaan yang jelas berbeda meskipun sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya sulitnya dalam penerapan penghindaran pajak, membuat para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan usaha untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara yang melanggar undang-undang perpajakan, misalnya wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Dari beberapa penelitian dan pendapat para ahli tarif pajak sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan pajak negara. Namun menurut penelitian Ardhyaksa dan Kiswanto (2014) menyimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan atas keadilan. Jika tarif pajak yang berlaku tinggi maka akan berbanding lurus tingkat penggelapan pajak juga akan tinggi (Permatasari, 2013).

Pemungutan pajak oleh negara harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari pemerintah. Peneliti Pulungan (2015) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Peneliti Elmiza, dkk (2014) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun menurut penelitian Ardhyaksa (2014) menyimpulkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan untuk membayar pajak akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak (Permatasari, 2013).

Pemerintah saat ini telah melakukan modernisasi layanan perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pajak bagi masyarakat, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pelaporan dan pembayaran pajak. Menurut penelitian Ardhyaksa (2014) menyimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian Permatasari (2013) menyimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun menurut peneliti Friskianti (2014) menyimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, semakin rendah tindakan penggelapan pajak (Permatasari, 2013).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan pendapat dalam menganalisis atau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atas tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Variabel yang digunakan didalam penelitian ini yaitu tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, dan yang terakhir adalah teknologi dan informasi perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan wajib pajak dapat segera mematuhi dan membayarkan pajak tepat pada waktunya sebagai bentuk warga negara yang baik dan taat aturan perundang-undangan. Pembayaran kewajiban pajak ini juga dapat menyukseskan pembangunan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah persepsi atas tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
2. Apakah persepsi atas keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
3. Apakah persepsi atas teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh persepsi atas tarif pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Mengetahui pengaruh persepsi atas keadilan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
3. Mengetahui pengaruh persepsi atas teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian yang diperoleh adalah :

a. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dalam mengetahui pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak di wilayah Sidoarjo Barat.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi untuk penelitian dalam topik mengenai pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya, khususnya untuk menambah pengetahuan dan keyakinan terkait pengaruh tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara garis besar dibagi kedalam beberapa bab, dimana setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab berisi uraian yang mendukung isi dari setiap bab secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tata cara untuk mengetahui masalah-masalah dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan pengambilan sampel, instrument penelitian, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek dan populasi penelitian serta aspek-aspek dan sampel yang nantinya akan dianalisis. Selain itu bab ini juga berisi tentang analisis data dan pembahasan hasil analisis yang dapat memecahkan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, serta saran atau implikasi dari hasil penelitian.